

DAFTAR RUJUKAN

Buku:

- Budiman, A. A. . (2021). Mengatur Ulang Kebijakan Pidana Di Ruang Siber : Studi Tentang Penerapan Uu Ite Di Indonesia. Institute For Criminal Justice Reform (IFCJR).
- Chazawi, A. (2022). Tindak Pidana Pornografi. Media Nusa *Creative (Mnc Publishing)*.
- Chazawi,A. (2016) Tindak Pidana Pornografi. Sinar Grafika
- Chazawi, A. (2013). Tindak Pidana Pornografi. Bayumedia Publishing
- Christianto, H. (2017). Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus. Suluh Media.
- Data Tempo. (2022). Pengaturan Ulang Pembentukan Badan Siber. Tempo Publishing
- Gaussyah. (2014). Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Kemitraan Partnership
- Gunawan, B., Ratmono, M. (2022). Kuasa Siber. Rayyana Komunikasindo
- Hasibuan, E. S. (2021). Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum. Pt. Rajagrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Kabalmay, Husin Anang. (2020). Hanilit Pertanggungjawaban Pidana Asusila. Lp2m Iain Ambon
- Kurniawan, B. (2023). Keutamaan Polisi Dalam Pemolisian Masyarakat Di Era Modernisasi Dan Kedudukan Polri Pada Upaya Meningkatkan Kamtibmas. Sespim Polri
- Mappatunru,D (2023).Hukum Acara Pidana Seri Penyelidikan, Penyidikan dan Upaya Paksa. Deepublish Digital
- Maskun (2014). Kejahatan Siber (Cyber Crime) : Suatu Pengantar. Kencana

- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram Univerity Press
- Mulkan, Hasanah (2022) Tindak Pidana Khusus. Pranamedia Group
- Mulyati, Ani. (2014). Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan Ri. Pusat Hubungan Masyarakat, Kementerian Perdagangan.
- Nurhayati, Y. (2020). Pengantar Ilmu hukum, Bandung: Nusa Media, 2020.
- Lamintang, PAF dan FT Lamintang, Dasar dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prahara, Surya (2022). Pembuktian Elektronik Dan Digital Forensik. LPPM Universitas Bung Hatta
- Purnama A. (2018). Hukum Kepolisian: sejarah dan peran polisi dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM.PT Refika Aditama
- Rahardjo, S. (2002). Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia. Jakarta: Buku Kompas
- Riadi, I. Muthohirin, F. (2022). Forensik Digital (Forensik Email). Diandra Kreatif
- Siregar,A. (2019). Regulasi Hukum Pornografi. Scopindo Media Pustaka
- Sofyan,M. (2020). Hukum Acara Pidana. Kencana
- Widiarty, S, (2024). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Publika Global Media
- Yestima,Febrina (2022) Hukum Acara Pidana Indonesia. Lppm Universitas Bung Hatta

Artikel Dalam Jurnal:

- Andriani, Y., Hermawan, N., & Indawati, Y. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Pornografi Dunia Maya (*Cyberporn*) (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur). *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*
- Ayub, M., & Sulaeman, S. F. (2022). Dampak Sosial Media Terhadap Interaksi Sosial Pada Remaja: Kajian Sistematis. In Jurnal Penelitian Bimbingan Dan Konseling (Vol. 7, Issue 1).

- Fithrotuningrum, A. (2021). Efektivitas Penegakan Hukum Penyidik Polda Riau Terhadap Penjualan Konten Pornografi Oleh Akun Anonim Melalui Media Sosial Twitter (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).
- Flambonita, S., Novianti, V., & Febriansyah, A. (2021). Bahaya Pornografi Melalui Media Elektronik Bagi Remaja Berbasis Penyuluhan Hukum. *Jurnal Abdidas*, 2(3), 603–610.
- Gurusinga, I. B., Ekaputra, M., & Marlina, M. (2024). Upaya Penanganan Kasus Penyebaran Konten Asusila Melalui Media Elektronik Oleh Subdit Siber Polda Sumatera Utara. *Locus Journal Of Academic Literature Review*, 3(2), 219-236.
- Hartono, M. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 281-302.
- Hasibuan, E. S. (2022). The Role of Indonesian Police Through “Cyber Patrol” in Preserving and Maintaining Cyber Room Security. *International Journal of Social Service and Research*, 2(8), 722-728.
- Haurissa, S., Metekohy, L. M., & Sialana, F. (2022). Peran Tim Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Maluku Dalam Mengatasi Masalah Pornografi Di Kota Ambon. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 2328-2335.
- Identifikasi, S., Jari, S., & Pidana, K. (2012). Fungsi Kepolisian Sebagai Penyidik Utama.
- Istifarra, A. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik. *Jurist-Diction*, 3(4), 1495.
- Kurniawati, R., Mulyadi, A., & Agustanti, R. D. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 11(Mei), 151–162.
- Nawawi, J., Darmawati, D., Tajuddin, M. A., & Nutakor, B. S. M. (2023). The Law Enforcement Related to Cyber Crime by Involving the Role of the Cyber

Patrol Society in Achieving Justice. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 11(3), 437-447.

Nurfitriah Pakaya, (2024). Upaya Penanggulangan Penyebaran Konten Pornografi Di Media Sosial. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 1(2), 10–24.

Pratama, G. H. (2021). Penerapan Hukum Terhadap Penyebar Video Porno Nomor 44 Tahun 2008 Tentang. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (Jphi)*.

Pribadi, R. (2023). “Problematika Proses Penyidikan Tindak Pidana Vidio Porno Melalui Media Elektronik Di Unit Ppa Polresta Denpasar ...

Sanjaya, A. A., Hartono, M. S., & Ardhya, S. N. (2022). Penggunaan Akun Media Sosial Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Penyidikan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 482-499.

Sasmitha, P. D. W., Sugiarta, I. N. G., & Subamia, I. N. (2022). Efektivitas Cyber Patrol Dalam Mengungkap Kasus Pornografi Di Polresta Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3), 277- 282.

Sekolah, M., Hukum, T. I., & Banten, P. (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Foto/Video Pornografi Dalam Media Elektronik. *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(2).

Suryaningrum, F. (2021). Efektivitas Penegakan Hukum Patroli Siber di Media Sosial. *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya*, 10(2), 121 - 132.

Wiraguna, K., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Tindak Pidana Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Terhadap Anak Dibawah Umur. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 372–377.

Yanti, G. A. C. I., Mangku, D. G. S., & Kertih, I. W. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Oleh Polres Buleleng. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 79-86.

Karya Tulis Ilmiah

Arfan, Afriansyah (2023) Peran Kepolisian dalam pencegahan penyebaran konten pornografi (Studi Kasus di polrestabes Kota Palembang). Skripsi Hukum: Fakultas Syariah Dan Hukum.

Setyananda (2019) Efektivitas Patroli Siber Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dalam Mencegah Penyebaran Konten Pornografi Di Twitter. Fakultas Hukum Dan Komunikasi Skripsi Hukum: Universitas Katolik Soegijapranata

Internet / Website

Erisamdy Pryatna (2022) Pengertian dan Dasar Kewenangan Laboratorium Forensik.(<https://www.erisamdyprayatna.com/2022/03/pengertian-dan-dasar-kewenangan.html>). (diakses pada 4 Januari 2025)

Arifiyadi T. (2019). Kekuatan Pembuktian Screenshot Laman Konten Pornografi. (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-pembuktian-iscreenshot-i-laman-konten-pornografi-lt51d1667d12418/>). (diakses pada 6 januari 2025)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2019
tentang Penyidikan Tindak Pidana

